BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan praktik kerja profesi apoteker di Dinas Kesehatan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tenaga Kesehatan memiliki peranan yang penting dalam mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat dalam hidup sehat serta meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata pada masyarakat luas.
2. Mahasiswa telah memperoleh wawasan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman praktis mengenai tujuan, fungsi, tugas pokok, kedudukan dan wewenang dari Bidang Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
3. Mahasiswa mengenal program-program Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Dinas Kesehatan.
4. Mahasiswa telah mempelajari serta mengetahui gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian dalam Dinas Kesehatan.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan praktik kerja profesi apoteker di Dinas Kesehatan maka saran yang dapat diberikan pada calon apoteker adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon Apoteker lebih mempersiapkan diri dengan meningkatkan pemahaman mengenai agar dapat

melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan baik.

2. Mahasiswa diharapkan lebih aktif dan tanggap selama menjalankan praktek kerja profesi agar para calon apoteker mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak sehingga mampu mencapai semua apa yang menjadi tujuan yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2025, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2025 tentang Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2021, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Kosmetika Yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2021, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2021, Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Izin Edar Kosmetik (Nomor Notifikasi Kosmetik).
- BPOM. (2023). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan dan Bahan yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, 625, 1–18.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023). Modul: Cerdas Memilih dan Menggunakan Obat Tradisional yang Aman. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Jakarta: Badan POM.
- BPOM. (2024). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. *Peraturan Perundang-Undangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan*.
- Kasmawati, H., Sida, N., Nirmala, F., Sabarudin, S., Suryani, S., Ekawati, D., Nispawati, A., Azzahra, N., Putram R., Sudiani,

S., Ramba, W. dan Aswani, A. 2024, Drug Abuse Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif: Edukasi Pencegahannya Pada Siswa SMA Negeri 8 Kendari, *Jurnal Pengabdian Farmasi*, **2(1)**: 23-29.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2010 tentang Prekursor, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kementerian Kesehatan, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Jakarta.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kemenkes RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kemenkes RI. 2012, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kemenkes RI. 2021. *Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia (FROTI)*. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/187/2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kemenkes RI. 2021. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan

Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan.

- Kemendes RI, 2021. Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 1997. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Republik Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Republik Indonesia, Jakarta
- Pemerintah Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Jakarta.
- Menkes RI, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Jakarta.